

ABSTRACT

Determinants of Fraud in Provincial Governments in Indonesia: A Fraud Triangle Theory Perspective

Desi Wulandari, 2024 (xvi + 90 pages)

Email: desiwulandari011202@gmail.com

The implementation of fiscal decentralization still has a negative impact on local governments related to power. Efforts made through misappropriation for personal gain and harming other parties are called fraud. This study aims to determine the effect of Regional Autonomy, Audit Opinion, and Employee Expenditure Ratio on Fraud in Provincial Governments in Indonesia using the Fraud Triangle theory perspective. The research data uses secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA) in the Audit Report (LHP) on Local Government Financial Statements (LKPD) and District Court decisions in the Directory of Supreme Court Decisions for the 2018-2022 period. The population in this study were 38 Provincial Governments in Indonesia with a total of 154 units of analysis (samples) that met the criteria with purposive sampling technique. The data collection technique used documentation techniques with data analysis methods using panel data regression analysis with the help of EViews 12 software. The results of this study indicate that partially Regional Autonomy has a positive and significant effect on Fraud. Meanwhile, Audit Opinion and Employee Expenditure Ratio have no effect on Fraud. Furthermore, simultaneously, Regional Autonomy, Audit Opinion, and Employee Expenditure Ratio jointly affect Fraud in the Provincial Government in Indonesia.

Keywords : Regional Autonomy, Audit Opinion, Employee Expenditure Ratio, and Fraud

ABSTRAK

Determinan *Fraud* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia: Perspektif Teori *Fraud Triangle*

Desi Wulandari, 2024 (xvi + 90 halaman)

Email: desiwulandari011202@gmail.com

Pelaksanaan desentralisasi fiskal masih memberikan dampak negatif bagi pemerintah daerah terkait kekuasaan. Usaha yang dilakukan melalui tindakan menyeleweng demi keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain disebut kecurangan (*fraud*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Otonomi Daerah, Opini Audit, dan Rasio Belanja Pegawai terhadap *Fraud* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia menggunakan perspektif teori *Fraud Triangle*. Data penelitian menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan putusan Pengadilan Negeri pada Direktori Putusan Mahkamah Agung periode 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan total unit analisis (sampel) yaitu sebanyak 154 yang memenuhi kriteria dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan *software EViews 12*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Otonomi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud*. Sementara itu, Opini Audit dan Rasio Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap *Fraud*. Selanjutnya, secara simultan, Otonomi Daerah, Opini Audit, dan Rasio Belanja Pegawai secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Fraud* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Opini Audit, Rasio Belanja Pegawai, dan *Fraud*